KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Media cetak:
- ☐ Bangka Pos
- ☐ Babel News
- ☐ Rakyat Pos
- ☐ Babel Pos
- ☑ Radar Bangka
- ☐ Lainnya: _____

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															✓
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
					✓

Thn: 2016

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
						✓																	

WaBUP :

Komitmen Kami untuk Perbaiki Kinerja.

Wakil Bupati Bangka, Rustamsyah saat menerima LHP dari BPK RI Perwakilan Babel, Kamis (15/12) kemarin. FOTO: IST

BPK RI Provinsi Babel menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Tata kelola Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d 2016 dan Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d 2016, Kamis (15/12).

Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Tata kelola Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d 2016 diterima langsung oleh Wakil Bupati Bangka, Rustamsyah sedangkan laporan Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d 2016 diterima Sekretaris DPRD Bangka, Andi Hudirman, yang mewakili pimpinan DPRD Bangka.

Wabup Bangka dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas penyerahan hasil penilaian kinerja Pemkab Bangka di dalam mengelola BUMD yang ada di kabupaten Bangka yang akan dijadikan landasan hukum untuk menindaklanjutinya. Pemkab Bangka tetap berkomitmen bahwa segala sesuatu yang merupakan hasil penilaian BPK RI tetap akan ditindaklanjuti untuk memperbaiki kinerja sesuai aturan yang berlaku dalam pengelolaan BUMD agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

"Kami akan menyelesaikannya secara singkat dan untuk RPJMD akan berkordinasi dengan DPRD Bangka dan akan diselesaikan dengan waktu yang telah ditetapkan. Kita juga tetap melakukan pengawasan bersama dengan Inspektorat Bangka dan hasil laporan BPK pada tahun ini akan dijadikan pengalaman untuk memperbaiki agar lebih baik lagi di tahun yang akan datang sehingga pengelolaan BUMD ini semakin baik dan bisa memberikan sumbangsih bagi pembangunan di Kabupaten Bangka," ungkap Rustamsyah yang didampingi oleh Sekretaris Dewan, Kepala Inspektorat, Darius, dan Kabag Humas, PDE, dan Santel Setda Bangka, Boy Yandra.

Sementara itu Kepala BPK RI Babel, Arif Agus dalam sambutannya mengatakan, pemeriksaan kinerja salah satu bentuk pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tujuan pemeriksaan, yaitu penilaian efektivitas tata kelola Pemda dan pembinaan BUMD dengan sasaran perencanaan strategis pemda sebagai road map dalam pengembangan BUMD, regulasi dan kebijakan kelembagaan pemda sebagai dukungan kapasitas dan kapabilitas pimpinan BUMD serta identifikasi dan penyelesaian permasalahan dan pembinaan BUMD. "Ini meru-

KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Media cetak:

- ☐ Bangka Pos
- ☐ Babel News
- ☐ Rakyat Pos
- ☐ Babel Pos
- ☑ Radar Bangka
- ☐ Lainnya: _____

Tanggal: 16

Bulan: 12

Thn: 2016

Halaman: 7

pakan memberikan masukan bagi pemkab bangka untuk pengembangan BUMD ke depan," jelasnya.

Ada beberapa hal permasalahan temuan dengan pemeriksaan ini, pertama peran strategis BUMD dalam menunjang pembangunan daerah belum ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pemda. Dalam temuan pertama ini sama dengan yang ada di setiap daerah, provinsi dan kota, belum terakomodir Peran strategis BUMD dalam RPJMD Pemda, arah dan tujuan pengembangan BUMD itu harus dituangkan dalam RPJMD.

Jadi, bagaimana pelaksanaan bumd bisa menunjang pembangunan daerah serta penguatan perekonomian daerah. Kedua, regulasi dan kebijakan pimpinan bumd belum sepenuhnya lengkap, selaras dan mutakhir. Ketiga, regulasi dan kebijakan bumd belum sepenuhnya diterapkan serta mendukung pembinaan dan pengelolaan bumd. Keempat, Pemkab Bangka belum memiliki struktur organisasi dan tupoksi pembinaan bumd yang jelas. Ini merupakan besaran permasalah temuan BPK. terkait perencanaan, peraturan, regulasi, struktur organisasi termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Dengan pemeriksaan ini mengharapkan menjadi masukan bagi Pemkab Bangka dalam memperbaiki penge" ungkap Arif Agus. **(rel/rb)**